

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,66. Inflasi tertinggi terjadi di Sampit sebesar 2,51 persen dengan IHK sebesar 105,98 dan terendah terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 1,42 persen dengan IHK sebesar 108,11.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,64 persen; kelompok transportasi sebesar 0,70 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,32 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,00 persen.

Tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) Provinsi Kalimantan Tengah pada Juni 2024 sebesar 0,28 persen dan tingkat inflasi year- to-date (y-to-d) Juni 2024 sebesar 1,05 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Perayaan Idul Adha yang jatuh pada bulan Juni 2024 mempengaruhi permintaan barang dan jasa di pasar dan kenaikan harga emas terhadap dollar AS berkontribusi pada peningkatan harga emas di Indonesia. Andil terbesar terhadap inflasi tahunan Kalimantan Tengah adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan sidak pasar/distributor/pedagang besar secara berkala. Pemantauan harga komoditas dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, dan distributor. Mendekati HBKN sidak pasar dilakukan oleh tim satgas pangan Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain, kota Palangka Raya, kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.dan penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TPID Provinsi Kalimantan Tengah juga rutin mengadakan kegiatan Gelar Pangan Murah yang sudah dilakukan sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang dilakukan merupakan suatu upaya dari Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna terciptanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintahan Tingkat Provinsi guna percepatan penanganan terhadap kondisi /situasi pada masing-masing wilayah, sehingga para pihak pemangku kepentingan dan keputusan segera dapat menindaklanjuti segala situasi dan kondisi terkait pengendalian harga di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pelaksanaan lainnya.

Sinergi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia serta bekerjasama dengan pihak-pihak seperti BULOG dan instansi/lembaga terkait sangat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat terhadap harga dan pemenuhan kebutuhan di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sinergi TPIP - TPID Provinsi dan Kab/Kota dalam program GNPIP.

Sinergi TPIP - TPID dan Kab/kota dalam program GNIP perlu terus dijaga dan diperkuat untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan baik secara internal maupun eksternal. Pemerintah daerah agar dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa pasokan beras dan bahan pangan di Kalimantan Tengah relatif aman. Terus dilakukan inspeksi harga di pasar, juga memastikan pasokan pangan yang meningkat selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga harga tetap stabil.

Antisipasi perubahan iklim untuk menjaga produksi pangan secara internal melalui pengendalian dampak cuaca terhadap kinerja pertanian di Kalimantan Tengah melalui pemantauan percepatan masa tanam dan hama penyakit, serta penyaluran sarana penunjang produktivitas pertanian. Selain itu, diperlukan komunikasi dalam menjaga ekspektasi inflasi dan afirmasi komitmen sinergi pengendalian inflasi. Perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan atau instansi terkait agar tiket pesawat, kapal dan angkutan darat, agar kenaikan tarif dapat diantisipasi, sehingga naiknya tidak berlebihan.